

# **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DI MEDIA KOMPAS DAN JAWA POS**

**(Analisis framing pemberitaan Ahok dan surat Al-Maidah di media Kompas  
dan Jawa Pos edisi bulan November)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika

Oleh:

**ANGGA DWI PRANATA**

**L100120030**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DI MEDIA KOMPAS DAN JAWA POS**  
**(Analisis framing pemberitaan Ahok dan surat Al-Maidah di media Kompas dan Jawa Pos edisi**  
**bulan November)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**ANGGA DWI PRANATA**

L100120030

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**Agus Triyono, M.Si**

NIK. 1105

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DI KOMPAS DAN JAWA POS**  
**(Analisis Framing Pemberitaan Ahok dan Surat Al-Maidah di Media Kompas dan Jawa Pos**  
**Edisi Bulan November)**

**OLEH**  
**ANGGA DWI PRANATA**  
**L 100 120 030**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**  
**Fakultas Komunikasi dan Informatika**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
**Pada Hari Rabu, 28 Maret 2018**  
**dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji :**

- 1. Agus Triyono, M. Si**  
**(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Budi Santoso, M. Si**  
**(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Yudha Wirawanda, MA**  
**(Anggota II Dewan Penguji)**

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)



**Dekan,**

**Nurgiyatna ST. M,sc.Ph.D.**

**NIK. 881**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 April 2018

Penulis



Angga Dwi Pranata

L 100120109

# **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DI MEDIA KOMPAS DAN JAWA POS** **(Analisis framing pemberitaan Ahok dan surat Al-Maidah di media Kompas** **dan Jawa Pos edisi bulan November)**

## **Abstrak**

Dalam setiap pemberitaannya, media selalu mengusung ideologi tertentu. Perbedaan ideologi tersebut dapat membuat satu fakta yang sama dapat diberitakan secara berbeda oleh masing-masing media. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok pada media Kompas dan Jawa Pos. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana media tersebut dalam membingkai dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok pada edisi tanggal 1 – 30 November 2016. Penelitian ini menggunakan teori framing dan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan perangkat analisis framing Entman yang meliputi atas: pendefinisian masalah (define problem), perkiraan masalah (diagnose cause), penilaian moral (make moral judgement), dan penekanan penyelesaian masalah (treatment recommendation). Hasil penelitian ini adalah bahwa Kompas mengkontruksi berita kasus dugaan penistaan agama terfokus pada politisasi aksi 411 sedangkan Jawa Pos dengan kontruksi berita kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok memicu disintegritas bangsa.

Kata Kunci : media massa, framing, penistaan agama

## **Abstract**

In its reporting, media always carries a certain ideology. These ideological differences can cause different reports towards the same facts. This research focuses on the reporting of religious insulting case by Ahok on Kompas and Jawa Pos. The purpose of this research is to find out how the media put its framing in covering the case of religious humiliation done by Ahok on the issued date of November 1 – 30, 2016. This research uses framing theory and qualitative approach with framing analysis method. Data collection techniques were conducted through documentation studies. Data analysis techniques use the Entman's framing analysis, which includes top: definition of problems, diagnose causes, moral make-up and treatment recommendation. The result of this research shows that Kompas focused on the politicization of action of 411 in viewing the Ahok case. Meanwhile, Jawa Pos constructed its news in the opinion that the case of religious defamation done by Ahok triggered national disintegration.

Key Word : mass media, framing, blasphemy

## **1. PENDAHULUAN**

Media massa merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kegiatan manusia dalam mencari sebuah informasi. Berita adalah informasi terbaru yang dapat datang dari arah mana saja (Ibrahim, 2007:4). Informasi yang disampaikan media

massa sudah menjadi kebutuhan manusia untuk mencakupi beberapa hal. Media massa memberikan peran yang strategis dalam memberikan informasi secara serempak kepada publik. Untuk memenuhi kebutuhan publik dalam hal informasi media massa memfasilitasi berupa penyajian berita baik melalui media cetak dan media elektronik. Media massa yang baik seharusnya dapat menjalankan fungsi sebagaimana yang diungkapkan oleh Harold Laswell (dalam Kresno, 2014), fungsi media massa yaitu untuk menginformasikan (*to inform*), untuk mendidik (*to educate*), dan untuk menghibur (*to entertain*). Pernyataan Laswell di atas, fungsi media massa dapat dijadikan hal yang memberikan sesuatu yang menarik bagi publik. Hal menarik yang diperbincangkan di publik tidak terlepas dari berita yang muncul dari media massa, berita yang di terbitkan oleh media massa dapat mengubah opini publik. Pesan yang di terbitkan media massa melalui majalah, koran, tv, radio, tabloid, dll, secara bersamaan dapat menjadikan sebuah isu dan perbincangan di kalangan masyarakat.

Informasi yang ditampilkan oleh media, pasti memiliki tujuan yang ingin disampaikan, entah itu tujuan komersial, ideologi, ataupun politik, untuk meraih suatu tujuan itu media membingkai berita dengan membujuk pembaca untuk memberikan opini sesuai dengan yang ingin dicapai oleh media tersebut atau dapat disebut dengan istilah framing. Menurut Robert N, Entman dalam (Wijanarko) teori framing adalah penonjolan aspek-aspek tertentu didalam sebuah berita, penonjolan aspek tertentu maksudnya membuang sebagian cerita dengan menonjolkan cerita tertentu. Maka seperti halnya sebuah media dalam memberikan informasi kepada publik, media dapat mengembangkan sebuah peristiwa yang dianggap dapat membuat publik terpengaruh dengan isu yang disampaikan. Media tentunya dalam hal ini juga mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu sehingga berusaha untuk menggiring opini publik kedalam suatu isu yang disampaikan oleh media. Maka framing disini berperan untuk membingkai sebuah informasi agar informasi yang disampaikan sesuai dengan kepentingan media (Wijanarko, 2014).

Pada September 2016, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Pidato yang membuat masyarakat Indonesia menjadi

terpecah belah, berawal dari kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Basuki Tjahya Purnama (Ahok) saat berada di Kepulauan Seribu, di kampanyenya itu Ahok di nilai melecehkan surat Al-Maidah ayat 51, saat itu Ahok menjelaskan program kerja pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarat dalam bidang perikanan pada tanggal 27 september 2016. Dalam pidatonya Ahok menjelaskan warga tak perlu takut soal kelanjutan bantuan dalam program kerjanya tersebut, apabila dirinya tak terpilih dalam Pilgub DKI 2017 (BBC, 2016).

Ahok menjamin program bantuan tersebut akan tetap berjalan apapun hasilnya dalam Pilgub tanggal 19 April 2017. Setelah menjamin program kerjanya Ahok menyinggung tentang surat Al-Maidah ayat 51 tentang pelarangan muslim memilih pemilih non muslim. Hal itu yang menjadi perbincangan dan perdebatan antara masyarakat Indonesia dimana Ahok bukan beragama Islam tetapi membawa-bawa surat Al-Maidah berawal dari itu kemudian muncullah video-video Ahok saat berkampanye di kepulauan Seribu saat mengucapkan penghinaan terhadap surat Al-Maidah ayat 51 tersebut, video yang paling viral adalah video yang diunggah oleh Buni Yani karena video tersebut hanya beberapa potongan dari pidato Ahok. Dengan pernyataan Ahok tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib pada tanggal 6 Oktober 2016. Pertama kali yang melaporkan Ahok kepada pihak berwajib adalah pengajara Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) kemudian disusul ormas-ormas lainnya (BBC, 2016).

Pada tanggal 10 Oktober sebenarnya Ahok sudah meminta maaf kepada umat muslim terhadap ucapannya saat di Kepulauan Seribu. Sesaat Ahok meminta maaf kemudian MUI pada tanggal 11 Oktober 2016 memberikan pendapat bahwa pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu merupakan penistaan agama. Menyikapi tanggapan yang dikeluarkan MUI massa FPI berdemo didepan kantor sementara bareskrim, mereka menuntut agar segera ditangkap dan dipenjara. Demo tidak hanya terjadi pada hari itu terjadi demo lanjutan yang digerakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang terjadi pada tanggal 4 November 2016 umat muslim dari berbagai kota berkumpul di ibu kota Jakarta untuk mendesak polisi agar segera memproses kasus Ahok, kemudian pada tanggal 15 November

gelar perkara kasus Ahok dimulai satu hari setelah gelar perkara dimulai Ahok ditetapkan sebagai tersangka tepatnya pada tanggal 16 november 2016 (BBC, 2016).

Kasus penistaan agama di Indonesia sudah terjadi beberapa kali antara lain, Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) dianggap metamorfosis Alqidah Al-Islamiyah dan penokohan Musaddeq sebagai juru selamat setelah nabi Muhammad SAW. Ajaran GAFATAR juga ditemukan pelafalan Syahadat yang baru. Penistaan agama Arswendo Atmowijiloto dianggap menistakan agama karena memuat hasil jajak pendapat. Tokoh pembaca Arswendo menempati urutan ke-10 tokoh pembaca kemudian nabi Muhammad SAW berada pada urutan ke-11, kemudian kasus penistaan agama Hindu oleh Rurgiani pernyataan Rurgiani bermula saat melewati depan rumah Ni Ketut Surati saat didepan situlah Rurgiani menyebut canang tersebut najis dan masih banyak kasus lainnya (Republika, 2016). Lia Eden pada 1998 menyebut dirinya mesias untuk membawa keamanan dan keadilan sebelum hari kiamat, selain itu menyebut dirinya sebagai reinkarnasi bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus kemudian ditahan pada tahun 2006, Tajul mulus alias haji Ali Murtadho pemimpin syiah kabupaten Sampang Jawa Timur ini di anggap mengajarkan ajaran sesat terjadi pada 2012, HB Jassin banyak dikritik setelah menerbitkan buku langit makin mendung karena menggambarkan Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril (Republika, 2016).

Berbagai kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia yang menjadi sebuah perbincangan dan isu yang tak kunjung selesai yaitu kasusnya Ahok. Membuat terjadinya sebuah aksi demo yang dibilang cukup besar karena tak kunjung-kunjungnya Ahok ditangkap. Menimbulkan perdebatan publik karena Ahok saat melakukan dugaan penistaan tersebut adalah calon gubernur DKI Jakarta dan seorang etnis China. Selain itu Ahok juga semakin berani dengan menyampaikan program ingin membuat wifi dengan nama Al-Maidah dan password kafir (VOA-Islam, 2017). Mulai dari situlah kemudian media-media di Indonesia mulai saling berlomba-lomba memberitakan perkembangan terhadap kasus Ahok dan surat Al-Maidah. Setiap media memberikan opini kepada publik secara berbeda-beda, tergantung kepentingan media tersebut. Media massa



sebagai suatu sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui sebuah peristiwa yang ada dalam jarak dekat maupun jauh, dampak informasi yang diberikan oleh media massa dapat dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan pemiliknya atau penguasa tertentu. Kepentingan tersebut merupakan bagian dari tujuan pemilik atau penguasa untuk memberikan opini kepada publik mengenai informasi atau berita yang disampaikan oleh media massa

Pada bulan November kasus Ahok mulai di tangani oleh pihak yang berwajib selang satu hari Ahok juga ditetapkan menjadi tersangka.. Alasan peneliti memilih media Kompas dan Jawa pos karena media tersebut mempunyai oplah yang tinggi di Indonesia. Kompas dan Jawa Pos sama-sama memiliki jumlah pembaca yang besar di Indonesia, sehingga mudah mempengaruhi opini publik yang dominan di masyarakat, (Nabila, 2013). Oplah Jawa Pos dengan jumlah pembaca mencapai 842.000 pembaca kemudian disusul oleh Kompas dengan pembaca 751.000 pembaca. Data tersebut merupakan data yang diteliti oleh Nielsen Consumer dan media view (CMV) pada 2017.( Jawa Pos, 2017). Media Kompas merupakan media yang hadir berkonsep nasionalis (Kompas, 2016). Kompas identik dengan penyajian beritanya yang halus, kritiknya tidak langsung mengenai tetapi pesan tetap tersampaikan dan Jawa Pos adalah koran yang lahir di Surabaya dan menyebar di seluruh Jawa timur, Bali dan sebagian Jawa tengah D.I Yogyakarta. Penyajian koran Jawa pos kental dengan pemikiran CEO media tersebut yaitu Dahlan Iskan, Jawa Pos terkenal lugas dan tegas dalam menyampaikan kritiknya. (Prihandini, 2011). Kompas dengan ideologi yang nasionalis menarik karena pada kasus Ahok ini menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Indonesia, dengan demikian apakah berita dari Kompas dapat mempersatukan bangsa atau memecah belah bangsa. Jawa Pos memiliki ideologi yang kental dengan politik sehingga menarik untuk dihubungkan dengan berita Ahok karena kasus ini berhubungan dengan lingkungan politik di Indonesia. Terdapat juga penelitian terdahulu yang mendukung penelitian seperti ini yaitu penelitian yang dilakukan (Wijanarko, 2014). Analisis framing pemberitaan deklarasi pencapresan Jokowi media massa Kompas, Republika dan Jawa Pos, hasil dari penelitian tersebut yaitu setiap media mempunyai cara yang berbeda

dalam membingkai berita dalam pencapresan Jokowi. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Dea Nabilla yang berjudul Analisis framing pemberitaan banjir Jakarta Januari 2013 di harian Kompas dan Jawa Pos. Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama meneliti media Kompas dan Jawa Pos, penelitian ini juga menggunakan analisis framing model Robert Entman. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kompas dan Jawa Pos dalam membingkai berita kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) ?

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini memakai deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman, karena model analisis framing Entman digunakan dalam studi kasus pemberitaan media dan jurnalistik, melihat bagaimana frame mempengaruhi kerja wartawan dan bagaimana wartawan membuat berita lebih penting dan menonjol pada aspek tertentu. Dalam konsep Entman, framing pada dasarnya terfokus pada pemberian definisi, penjelasan definisi, evaluasi dan rekomendasi terhadap wacana untuk menonjolkan kerangka berfikir tertentu pada kejadian yang diwacanakan. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif berfungsi untuk menggambarkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa yang dibingkai oleh surat kabar dan kemudian menjadi berita (Kriyantono, 2010). Dalam hal ini mengenai pemberitaan kasus dugaan penistaan agama terhadap surat Al-Maidah yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Robert N. Entman berpendapat bahwa framing mengimplikasikan seleksi (*selection*) dan penonjolan (*salience*). Framing model Entman mengartikan persoalan-persoalan, mendiagnosa penyebab, mengolah penilaian moral, dan menyarankan perbaikan-perbaikan. Frame memakai textual device seperti kalimat tertentu, frase-frase tertentu, membuat definisi kontekstual tertentu, menentukan gambar-gambar tertentu, menyampaikan contoh-contoh yang tipikal atau menunjukkan pada sumber tertentu (Hamdan, 2014).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi pemberitaan kasus Ahok pada surat kabar Kompas dan Jawa Pos kemudian melakukan pengamatan isi pemberitaan Ahok dalam objek penelitian yaitu surat kabar Republika dan Kompas. Dokumentasi bertujuan untuk menggali data-data dari masa lampau secara sistematis dan obyektif (Kriyantono, 2010).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Media dalam membentuk berita sebuah peristiwa atau isu terkadang tidak terlepas dari latar belakang ideologi atau visi media tersebut, sehingga berita yang dibuat dikonstruksi mengikuti sesuai perspektif yang dimiliki masing-masing media. (Rusmulyadi, 2013). Seperti dalam media Kompas dan Jawa Pos sebagai surat kabar Nasional di Indonesia tentu memiliki perspektif sendiri dalam memberitakan suatu peristiwa, termasuk kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Kompas dan Jawa Pos mempunyai kebebasan dalam memaknai dan memberitakan realitas konflik tersebut.

Kompas mendefinisikan masalah pada kasus Ahok adalah demonstrasi yang dipolitisasi beberapa pihak, karena pada demo ini dilakukan oleh cukup banyak massa. Hal tersebut didukung dengan pernyataan politisi PDIP :

“ ada yang berunjuk rasa karena tidak suka Jokowi sejak dilantik presiden dan ada pula yang unjuk rasa karena memang tidak suka dengan Basuki. Selain itu, ada partai politik yang terang-terangan yang mendukung pemerintah, tetapi ikut unjuk rasa.Selanjutnya terkait dengan kepentingan pemilihan kepala daerah (PILKADA) DKI Jakarta tahun 2017,” ujar Tubagus Hasanuddin (kompas, 9 November 2017).

Kompas mengambil pernyataan dari politisi PDIP karena pasangan Ahok dalam mencalonkan gubernur tergabung dalam partai PDIP yaitu Djarot Zaiful Hidayat, berarti disini Kompas ingin menunjukkan suara atau tanggapan dari pendukung Ahok. Maksud pernyataan “terkait dengan kepentingan pemilihan kepala daerah” bahwa demo tersebut di politisasi oleh beberapa pihak untuk kepentingan pilkada.

Pada bagian lainya Kompas mengutip pernyataan Zulkifli selaku ketua Partai Amanat Nasional bahwa demonstrasi tersebut dapat melenceng dari tujuan yang semestinya. PAN merupakan partai yang berseberangan dengan pendukung Ahok karena PAN merupakan partai pengusung lawan Ahok dalam pencalonan Gubernur DKI yaitu Agus Yudhoyono dan Silvi, pernyataannya sebagai berikut “yang mau unjuk rasa silahkan sampaikan pesan dengan damai, tidak bisa juga dilarang-larang. Namun jangan ada pernyataan yang aneh-aneh yang membawa isu sensitif seperti SARA. Kalau saya sendiri tidak akan ikut berpartisipasi dalam aksi, biar penegak hukum yang bekerja”. (Kompas 01 November 2016).

Pernyataan tersebut dapat diartikan “Namun jangan ada pernyataan yang aneh-aneh yang membawa isu sensitif seperti SARA”. Kompas memberikan opini demonstrasi dapat dimasuki untuk membuat isu SARA, karena Ahok bukan merupakan keturunan asli pribumi. Kesimpulan berita diatas adalah Kompas dalam memberitakan demonstrasi kasus Ahok tidak perlu terjadi, karena dikhawatirkan demonstrasi dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat supaya menyerahkan dan percaya kepada penegak hukum yang bekerja.

Dalam bagian diagnose cause, bahwa demo 411 di tunggangi oleh elit politik yang berujung kerusuhan dan demonstrasi berlanjut hingga malam hari. Hal ini dianggap ada provokator dibelakang aksi tersebut, seperti pada head line Kompas pada tanggal 5 November dengan judul berita “Presiden: Aktor Politik Menunggangi”. Pada judul berita ini Kompas menjelaskan ada aktor politik dibalik aksi 411. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Indonesia

“Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata Jokowi (Kompas, 5 November 2017).

Kompas dalam mengambil pernyataan dari Presiden karena Kompas ingin menunjukkan bahwa demonstrasi tersebut tidak murni menyampaikan pendapat tetapi ada kepentingan politik didalamnya. Lewat pernyataan presiden karena presiden merupakan orang yang dianggap masyarakat mempunyai bobot dalam memberikan pendapat. Presiden juga seorang kader partai PDIP. Partai PDIP dalam kasus ini menjadi sorotan masyarakat dan merasa terpojok karena salah satu partai pendukung calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Dugaan

intervensi presiden terhadap kasus Ahok timbul sehingga proses hukum Ahok menjadi lambat dan mengakibatkan reaksi umat islam dengan sebutan aksi 411. Aksi tersebut hingga menjadi aksi demonstrasi terbesar setelah reformasi di Indonesia, hingga muncul dugaan aktor politik menuggangi aksi tersebut. Seperti pernyataan diatas menjelaskan kerusuhan yang terjadi setelah aksi 411 jumat malam ada aktor politik yang memanfaatkan situasi. Panglima TNI juga memberikan pernyataan

“Pemicu kerusuhan adalah provokator. Entah dari mana provokator itu berasal, tetapi yang jelas bukan dari kami,” kata Bachtiar Nashir. (Kompas, 6 November 2017).

Bactiar Nashir merupakan salah satu penggerak demo 411. Sebagai ulama tentu pernyataanya akan dianggap benar oleh masyarakat. Berdasarkan kutipan-kutipan tokoh di atas dan tokoh-tokoh tersebut mempunyai pengaruh besar dimasyarakat serta memiliki bobot yang berkualitas. Kompas merinci bahwa ada elit politik dibalik demo 411 yang membuat ada beberapa demonstrasi yang belum membubarkan diri hingga larut malam hingga sampai membuat kerusuhan.

Pada bagian penyelesaian masalah. Kompas memberitakan tindakan pemerintah dalam merespon demo tersebut, yaitu dengan menerima tiga tokoh pengunjuk rasa dan membuat kesepakatan berikut pernyataan Wakil Presiden :

“kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili massa yang luar biasa banyaknya. Kesimpulannya ialah dalam hal Saudara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu sehingga semua berjalan sesuai aturan, tetapi dengan tegas,” ujar Kalla. (Kompas, 5 November 2017).

Dari pernyataan Wakil Presiden diatas Kompas menunjukkan respon atau tanggapan yang positif dari pemerintah. Pemerintah menerima dan mengajak wakil dari pendemo untuk berdiskusi untuk menghasilkan kesepakatan, antara lain yaitu Kapolri akan segera memproses hukum Ahok dengan cepat dan tegas.

Pada teks berita yang lain. Pemerintah akan melakukan proses hukum ahok secara transparan untuk membuktikan bahwa tidak ada intervensi dari

pemerintah. Terdapat judul berita pada halaman 4 tanggal 26 November 2017 “Kasus Basuki Segera Tuntas: Proses hukum sudah berjalan Transparan.” Dengan judul berita tersebut Kompas mengagap pemerintah sudah merespon dengan cepat kehendak masyarakat Indonesia terhadap dugaan penistaan Agama. Terdapat juga pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan :

“sebaiknya masyarakat tenang. Kepala Polri telah menjanjikan proses yang berjalan cepat, tegas dan transparan.” Kata Wiranto (Kompas 9 November 2017).

Lewat pernyataan Wiranto yang menjabat sebagai menteri dan pernah bekerja dibawah 3 presiden yang berbeda di Indonesia dianggap mempunyai pengalaman dan membuat masyarakat yakin dengan pernyataanya. Kompas menunjukkan bahwa masyarakat tak perlu lagi cemas atau bingung, karena polisi berjanji akan menangani kasus dugaan penistaan agama dengan cepat, tegas dan transparan. Jadi pemerintah akan mempublikasikan segala hal tentang perkembangan proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Terdapat judul berita yaitu “Hormati Proses Hukum” pada tanggal 17 November 2016. Kompas menunjukkan bahwa masyarakat harus menghormati proses hukum dan tidak memaksakan kehendak. Supaya tidak timbul kekacauan dan memecah belah bangsa Indonesia. Hal tersebut ditunjukan Kompas dengan memuat teks berita :

Berdasarkan pemberitaan Kompas, dapat di ambil benang merah bahwa Kompas menitikberatkan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok melihat kasus penistaan agama tersebut dipolitisasi. Kasus penistaan agama menimbulkan reaksi masyarakat dengan menggelar demonstrasi yang besar atau dikenal dengan aksi 411. Demonstrasi tersebut yang dianggap Kompas dipolitisasi oleh elit-elit politik hingga kemudian demonstrasi belum bubar hingga malam hari. Dalam meyakinkan pembaca, Kompas mengambil pernyataan dari Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia karena kasus ini dianggap mencemaskan masyarakat Indonesia. Namun dalam pernyataanya, Jokowi tidak menyebutkan siapa elit politik yang menunggangi aksi tersebut. Jokowi hanya

mengatakan mempunyai intelegen dan data-datanya. Dalam menyampaikan berita, Kompas lebih menekankan perhatian pada tindakan melanggar UU No 9 Tahun 1998 dengan menampilkan judgement atas tindakan tersebut daripada penyebab demonstrasi tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan penampilan Judul, sub judul dan kutipan teks berita pada media Kompas dengan penilaian negatif terhadap aksi 411.

Berdasarkan analisis teks yang ditemukan dalam media Kompas, dapat dilihat bahwa media Kompas tidak lepas dalam mengkontruksi kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Kompas juga memilah-milah berita mana yang harus di ekspos dan mana yang tidak harus di ekspos. Hal tersebut terlihat dalam pemberitaan Kompas bahwa yang di ekspos atau diterbitkan hanya penungggangan elit politik dalam aksi 411 dan demonstrasi yang belum bubar hingga larut malam dan berakhir ricuh. Sementara hal yang menarik dari demonstrasi seperti tidak ada taman yang rusak dari aksi tersebut, tidak ada sampah yang berserakan setelah aksi tersebut selesai, saling berbagi dan tolong menolong dalam aksi tidak terekspos. Kompas dalam memilih narasumber berita juga kebanyakan dari pendukung Ahok jadi informasi yang muncul cenderung sepihak. Keberpihakan Kompas tidak lepas dari latar belakang media tersebut seperti halnya dalam penelitian Kristanto bahwa sebagai media yang lahir dari kelompok Katolik tentu tetap memiliki akar agama Katolik (Hartadi, 2012).

Pada bagian ini, Kasus Ahok menjadi isu nasional kemudian memicu para elit politik saling melaporkan. Elit politik yang harusnya menjadi pemersatu bangsa dan memajukan bangsa ini tetapi menjadi sebaliknya para elit politik saling menjatuhkan untuk kepentingan partai saja. Hal ini didukung kutipan teks berita berikut ini :

“.....Jakarta-Jangan terlalu berharap suasana kehidupan bernegara akan sejuk sampai akhir tahun ini. Setelah unjuk rasa 4 November, edisi 25 November sudah disiapkan apabila proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap tidak memuaskan. Selain itu, pelaporan elite politik ke kepolisian adanya gerakan untuk saling menjatuhkan.....”( Jawa Pos, 12 November 2016).

Jawa pos dengan kutipan teks diatas ingin menunjukkan bahwa sejak penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, menimbulkan kegaduhan dalam berkehidupan bernegara karena unjuk rasa besar-besaran sudah disiapkan. Elit politik didalam partai juga saling melaporkan antara partai pro Ahok dan Kontra Ahok. Pelaporan elit politik tersebut bukan lagi tentang kritik melainkan untuk upaya menjatuhkan. Hal ini didukung kutipan dan pernyataan pengamat politik sebagai berikut :

“.... Hal tersebut diawali dengan banyaknya pernyataan-pernyataan yang sifatnya saling menjatuhkan dan membunuh karakter. “Bukan lagi murni soal kritik,” kata Ray Rangkuti ( Jawa Pos, 12 November 2016).

Jawa pos mengambil pernyataan dari Ray Rangkuti karena dia seorang pengamat politik dan pendiri Lingkar Madanai (lima), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemantau pemilu, mengkritik parlemen dan memerangi korupsi. Berhubungan dengan terjadinya dugaan penistaan agama, Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jawa Pos ingin mengkritik elit politik saat ini yang ingin saling menjatuhkan dan memetingkan partainya. Ray Rangkuti merupakan salah satu pendiri Komite Indepeden Pemantau Pemilu (KIPP). Pernyataan diatas menjelaskan keadaan saling lapor para elit politik bukan lagi disebabkan karena saling mengkritik tetapi untuk menjatuhkan lawan. Ray rangkuti menilai gerakan saling lapor tersebut menunjukkan kemerosotan etika politik dari para politikus saat ini. Perpecahan tidak hanya terjadi dilingkungan partai politik tetapi dilingkungan media sosial juga banyak muncul ujaran kebencian. Jawa Pos dengan teks berita sebagai berikut:

.....” menurut Jokowi, satu hal yang perlu diredam saat ini adalah ujaran kebencian di media sosial (medsos). Khusus umat islam, sebaiknya medsos dijadikan sarana untuk syiar dakwah. Bukan saling menghujat dan mencacimaki. Apalagi memifitnah....” (Jawa Pos, 14 November 2016).

Kutipan teks berita diatas menjelaskan saat ini media sosial banyak digunakan oleh sekompok orang untuk menyebar kebencian dari pernyataan diatas dikhususkan sekelompok orang tersebut adalah umat islam.. Dalam teks tersebut Jawa Pos menyudutkan agama Islam lewat kritikan Jokowi bahwa umat



Islam yang menyebar kebencian lewat media sosial padahal terdapat kelompok lainnya yang juga menyebar kebencian. Menurut Jokowi umat islam menggunakan media sosial untuk menyebar kebencian dan Jokowi menyarankan media sosial sebaiknya untuk syiar dakwah Jokowi memberikan saran untuk menggunakan media sosial sebagai berikut:

“ saya biasanya menggunakan media sosial untuk hiburan, yang lucu-lucu. Tapi, kalau sudah bantai, bunuh, itu tidak islami,” ujar Joko Widodo ( Jawa Pos, 14 November 2016).

Jawa Pos dari pernyataan diatas menilai saat ini media sosial digunakan tidak lagi manusiawi atau tidak sesuai dengan ajaran islam. Melalui dari pernyataan presiden, karena presiden merupakan jabatan tertinggi di Indonesia diharapkan masyarakat dapat mematuhi sarannya dan saran tersebut merupakan kebaikan untuk rakyat Indonesia. Jawa Pos menyarankan para pengguna media sosial untuk menggunakan media sosial untuk lucu-lucuan, jangan digunakan untuk menyebar kebencian karena hal tersebut dapat memecah belah bangsa.

Berdasarkan pernyataan diatas Jawa Pos menilai bahwa kasus Ahok ini membuat polarisasi yang menjadikan masyarakat terpisah. Maksud dari polarisasi adalah proses perbuatan cara menyinari, penyinaran, magnetisasi pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan) yang berlawanan. Karena Ahok saat melakukan penistaan agama dirinya berstatus sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tentu saat itu Ahok mempunyai kubu yang pro dan juga yang kontra denganya. Jawa pos mengambil pernyataan kapolri karena tentunya beliau mengerti akan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Kapolri mempunyai tanggung jawab atas keamanan pilkada di setiap daerah. Pengambilan pernyataan dari kapolri, karena Tito mempunyai tanggung jawab atas keamanan di setiap daerah dan mempunyai peran penting terhadap kasus Ahok. Kapolri juga ikut andil dalam menerima dan berdiskusi dengan perwakilan aksi 411. Tito juga menjadi sorotan masyarakat, karena kasus ini membesar disebabkan polisi yang lamban dalam menangani kasus Ahok.

Penyelesaian masalah pada tema ini adalah jawa pos mengakat judul berita pada tanggal 5 November 2016 “JK: Kasus Ahok Tuntas Dua Pekan” judul

tersebut mengartikan bahwa pemerintah akan menyelesaikan kasus Ahok dengan cepat. Judul tersebut didukung pernyataan JK dalam teks berita

“ Kapolri menjanjikan selesai dalam dua minggu,” Kata JK. (Jawa Pos, 5 November 2016)

Jawa Pos menjelaskan bahwa peran dari ulama juga diperlukan untuk meredam suasana yang memanas akibat kasus dugaan penistaan agama, karena ulama dianggap mampu memberikan pencerahan dengan ilmu agamanya kepada para masyarakat agar tidak bertindak sendiri tanpa melewati proses hukum. Jokowi berharap berani mengambil sikap tegas bahwa Islam dan Keindonesiaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan dengan demikian NKRI akan tetap terjaga keutuhannya. Presiden tidak hanya melakukan konsolidasi dengan ulama, beberapa elit politik juga ditemui oleh presiden seperti kutipan teks berita sebagai berikut :

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan konsolidasi. Setelah Prabowo Subianto, kemarin (21/11) Jokowi menerima kunjungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istan Merdeka. (Jawa Pos, 22 November 2016)

Peran para elit politik saat ini sangat diperlukan untuk memberikan gagasan-gagasan yang dapat membuat kesejukan dilingkungan politik saat ini. Partai politik juga berperan menentukan masa depan bangsa. Para elit politik ini tentunya diharapkan supaya juga dapat mengarahkan partainya untuk menjaga NKRI. Konsolidasi tidak hanya dilakukan oleh presiden kapolri juga melakukan konsolidasi seperti teks berita pada Jawa Pos sebagai berikut :

Isu makar yang bakal menunggangi rencana demonstrasi 25 November dan 2 Desember 2016 bukan isapan jempol. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memberikan arahan kepada jajaran Mabes Polri, Mabes TNI, Kapolda, Pangdam, dan Pangkotama di seluruh Indonesia. (Jawa Pos, 22 November 2016)

Jawa pos dalam memberika penyelesaian masalah melalui teks berita tersebut bahwa saat ini bukan hanya peran presiden yang diperlukan tapi kapolri dan Panglima TNI juga diperlukan untuk menjaga kesatuan bangsa. . Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI

Jenderal Gatot Nurmantyo. ”Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo”, dari teks tersebut, Jawa Pos menggambarkan kasus ini dapat membahayakan keutuhan NKRI karena dua kepala teringgi polisi dan TNI sampai turun tangan. Hingga Presiden juga menyuruh kapolri untuk menyiarkan gelar perkara Ahok, seperti dalam pernyataan Tito berikut ini :

“Presiden meminta gelar perkara disiarkan secara live”, kata Tito. (Jawa Pos, 6 November 2016)

Pernyataan tersebut mengartikan bahwa kasus ini berbeda dengan kasus yang lain. Jawa Pos menilai pemerintah bersungguh-sungguh dalam menangani kasus Ahok hingga kasus tersebut mempunyai perlakuan khusus. Jawa pos mengambil pernyataan dari Tito karena Kapolri dinilai paling mengerti terhadap proses hukum. Gelar perkara yang tidak wajar ini karena umunya hanya menghadirkan para pihak yang terkait dengan kasus. Namun, untuk membuktikan bahwa pemerintah transparan, polisi menyiarkan secara live gelar perkara. Gelar perkara yang disiarkan live tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat ada pihak yang menentang gelar perkara disiarkan secara live karena gelar secara terbuka merupakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penegak hukum. Kapolri berharap publik melihatnya secara jernih, seperti pernyataannya sebagai berikut :

“kami harap dengan gelar perkara terbuka, publik bisa melihatnya secara jernih,” ujar mantan Kapolda dan Metro Jaya (jawa Pos, 6 November 2016).

Perlakuan khusus ini diakibatkan dari reaksi masyarakat terhadap kasus Ahok. Pemerintah dituding mengintervensi kasus Ahok hingga terjadinya aksi 411. Tudingan tersebut dikarenakan presiden Jokowi satu partai dengan Djarot yaitu wakil Gubernur dari pencalonan Ahok sebagai Gubernur. Berdasarkan pemberitaan Jawa Pos, dapat di ambil benang merah bahwa Jawa Pos menitikberatkan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh memicu disintegritas bangsa. Penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok menjadi isu nasional hingga mengakibatkan para elit politik saling lapor ke polisi dan menyebarnya ujaran kebencian di media sosial. Jawa Pos menjelaskan hal ini berakibat polarisasi yang

menjadikan masyarakat terpisah dan menjadikan masyarakat hanya berkonsentrasi pada pilkada DKI Jakarta padahal pilkada berlangsung diseluruh Indonesia. Dalam melakukan penekanan, Jawa Pos mengambil pernyataan dari Tito Karnavian selaku Kapolri di Indonesia karena kasus ini berhubungan dengan keamanan di Indonesia. Kapolri dinilai paling mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan keamanan di Indonesia. Jawa Pos cenderung menampilkan berita dampak-dampak yang ditimbulkan dari kasus penodaan agama. Hal ini terlihat dari judul berita dan teks berita yang ada di Jawa Pos yang menjelaskan kasus penodaan agama mengakibatkan masyarakat menggelar aksi demonstrasi dan membuat masyarakat terpecah belah

Analisis teks yang ditemukan di media Jawa Pos, bahwa media Jawa Pos juga tidak lepas dalam mengkontruksi berita dalam kasus yang dilakukan oleh Ahok yaitu dugaan penistaan agama. Jawa Pos tentunya juga memilih peristiwa mana yang patut diekspos untuk bahan berita dan mana yang tidak patut. Hal tersebut nampak dalam pemberitaan Jawa Pos yang dipilih atau diekspos hanya dampak dari tindakan Ahok yang melecehkan atau melakukan penodaan agama. Namun, dalam pemilihan narasumber Jawa Pos cenderung berimbang antara pro Ahok dan kontra Ahok. Jadi berita yang muncul tidak sepenuhnya kontra dengan Ahok. Jawa Pos dalam menonjolkan berita tentunya mempunyai beberapa alasan, seperti dalam penjelasan penelitian yang menjelaskan bahwa Jawa Pos dipimpin oleh seorang Dahlan Iskan yang termasuk dalam anggota partai, sehingga secara tidak langsung memiliki afiliasi dengan politik. Afiliasi media dan politik itulah yang bisa mempengaruhi proses pemingkaian berita media tersebut (Matanandau, 2015). Walaupun sekarang pimpinan dari Jawa Pos sudah digantik namun akar dari ideologi sebelumnya tentunya masih ada. Penelitian sebelumnya yang mendukung hasil penemuan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aunur dengan judul penelitian Analisis Framing Berita Basuki Tjahaja Purnama di Media Massa Suray dan Jawa Pos yang menghasilkan, berita yang ditekankan dalam media Surya lebih kepada pro Ahok sedangkan media Jawa Pos berita yang ditekankan lebih kepada sikap kontroversinya Ahok yang

selalu membuat kesalahan dihati umat muslim, teks berita di Jawa Pos menggiring pembaca untuk kontra kepada Ahok (Rofiqoh, 2017).

#### **4. PENUTUP**

Pemberitaan Kompas dan Jawa Pos terhadap kasus penodaan agama merupakan bentuk kesadaran media dalam melihat konflik sebagai ladang berita yang memiliki *news value* yang tinggi. Besarnya nilai berita ini karena banyaknya kepentingan masyarakat yang dapat menarik perhatian masyarakat lainnya berkaitan adanya hubungan emosional atau kepentingan lainnya. Kompas dan Jawa Pos berusaha menunjukkan realitas sosial lewat realitas media (teks berita). Konflik sosial terdapat batasan yaitu intensitas maupun ruang lingkupnya, hal tersebut didasari adanya ideologi yang ingin menciptakan kemauan-kemauan, nilai-nilai dan harapan menurut sistem yang sudah ada. Realitas media merefleksikan subjektivitas media dan wartawan, sebab realitas media dibuat oleh media yang pada dasarnya memang tidak lepas dari subjektivitas individual wartawan, organisasi, kepemilikan dan kepentingan lain diluar media itu sendiri. (Mahdi, 2015)

Penelitian ini juga berusaha untuk menampilkan informasi terhadap adanya keterkaitan antara kedudukan media dan konstelasinya dengan kepentingan media, maksud dari hal tersebut yaitu realits yang diekspos media bukan hanya disajikan begitu saja namun dibingkai dan disesuaikan dengan berbagai kepentingan yang ada dibelakang media tersebut. Dalam berita konflik, apa yang dilihat dan didengar kita tentang konflik dibentuk oleh media. Bentuk cerita media yang ditampilkan diatur dari perspektif mereka. Wartawan mempunyai keyakinan dan pendapat melalui pengalaman mereka (Bratic & Schirch, 2007).

Hasil yang ditemukan dalam penelitian analisis pemberitaan di Kompas dan Jawa Pos menunjukkan bahwa dua media tersebut mempunyai bingkai berita yang berbeda terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Perbedaan bingkai tersebut terpengaruh terhadap cara dua media tersebut dalam menonjolkan, mengemas, dan menyeleksi isu melalui penggunaan kata dan

kalimat yang ada. Kompas dalam membingkai kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok telah dipolitisasi oleh elit politik sedangkan Jawa Pos lebih menonjolkan dari dampak yang ditimbulkan oleh kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Perbedaan dari pembedaan tersebut tentunya mempunyai alasan salah satunya yaitu mengikuti keyakinan dari jumlah pembaca. Kompas yang pembacanya lebih dominan di Jakarta dan mempunyai latar belakang agama katolik lebih kontra terhadap agama Islam sedangkan Jawa Pos yang berdominan di daerah Jawa Timur tentunya lebih bercondong ke agama Islam karena di Jawa Timur banyak Pesantrennya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Afridhita, R. (2016). Kontruksi Pemberitaan Mediasi Keraton Kasunanan Surakarta. *Jurnal Komunikator*

As'ari, J (2014). Analisis Framing Pemberitaan Pilkada KALTIM di Surat Kabar Kaltim post dan Tribun KALTIM Edisi 11 mei 2013.

Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapan Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal pancasila dan kewarganegaraan*, 1(2)

Azpiroz, L.M. (2014). Framing and Political Discourse Analysis :Bush's Trip to Europe in 2005. *Observatorio e- journal*, 11(4)

BBC. (2013). Kronologi Kasus Ahok Hingga di Tetapkan Sebagai Tersangka. Diakses pada 04 April 2017 tersedia <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37997721>

Bratic, V, & Schirch, L. (2007). Why and When to Use the Media For Conflict Prevention and Peace Building

Bungin, B.(2008). *Kontruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L Berger & Thomas Luckman* (Cetakan 1). Jakarta : Kencana

Bowen. (2015). A Framing Analysis of Media Coverage of the Rodney King Incident and Ferguson, Missouri, Conflicts. *Juornal of Undergraduate Research in Communications*, 6(1)

Dosi, E. (2012). *Media Massa Dalam Jaring Kekuasaan*. Yogyakarta : Solusi Offset

- Egbunike, N. (2014). Framing The #Occupy Nigeria Protest In Newspaper and New Media.
- Entman, R. N. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, 43(4).
- Fahlevi, F (2012). Hirarki Pengaruh Pemberitaan Ahmadiyah di Majalah Tempo.
- Hamdan. (2014). Analisis Framing Pemberitaan Perseteruan KPK dan Polri di Media Kompas.com dan Vivanews.com
- Hartadi, K. (2012). Analisis Framing Studi Kasus Kompas dan Media Indonesia Dalam Liputan Kerusuhan Di Temanggung 8 Februari 2011
- Ibrahim, S, I. (2011). *Kritik Budaya Komunikasi* (Cetakan I). Yogyakarta : Jalasutra
- Jawa Pos. (2017). Nielsen : Jawa Pos Koran No 1 Indonesia. Diakses pada 1 April 2018 tersedia <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20171207/281496456617467>
- Karman. (2013). Media Massa dan Kontruksi Realitas.
- Kreno, D. S. (2014). Kontruksi Sosial Pemberitaan Kasus Simulator SIM di Media Online Kompas.com
- Kriyantono, R (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana
- Mahdi, A. (2015). Berita Sebagai Representasi Ideologi Media (Sebuah Telaah Kristis).
- Matanandau, R. (2015). Analisis Framing berita pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
- Millioni L.D, Sprydou P.L,Vadratsikas K. (2014). Framing Immigration In Online Media and Television News in Crisis-Stricken Cyprus. *Research grant Provided by the European Integration Fond*, 27(1)
- Morrisan. (2014). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana.
- Nabila, D. (2013). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2013 di Harian KOMPAS dan Jawa Pos.
- Özaşçılar & Ziyalar. (2015). Framing Prostitution in Turkey: News Media Coverage of Prostitution. *International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS)* , 10(2), 152-164.

Panji, N. (2013). Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoe dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media Indonesia Periode 22-31 Januari 2013

Prihandini,P,F. (2011). Konstruksi Media Terhadap Pansus Century

Profil.kompas. (2016). *Beranda Kompas*. Diakses pada 20 Desember 2014 tersedia di<http://profile.print.kompas.com/profil/>

Republika.(2016). Ini kasus Penistaan Agama di Indonesia yang Diproses. Diakses pada 02 April 2017 tersedia Hukum.<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/18/of81e3330-ini-kasus-penistaan-agama-di-indonesia-yang-diproses-hukum>

Rusmulyadi .(2013). Framing Media Islam Online atas Konflik Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 03(01).

Rofiqoh, A. (2017). Analisis Framing Berita Basuki Tjahaja Purnama di Media Massa Surya dan Jawa Pos

Sakura,T. (2015). Framing a Trade Policy : An Analysis of The Wall Strret Jouranal Coverage of Super 301. *Intercultural Communication Studies*, 24(3)

Triyono, A. (2012). Produksi Teks dalam Perspektif Ekonomi Politik Media. *KomuniTi*, 4(1)

VOA-Islam. (2017). Video Viral, Ahok: Pasang Wifi Al-Maidah 51 Passwornya kafir. Diakses pada 02 April 2017 tersedia <http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2017/02/08/48782/video-viralahokpasang-wifi-al-maidah-51-passwordnya-kafir/#sthash.NN0d4hYx.dpbs>

Wijanarko, Y. A. (2014). Analisis Framing Deklarasi Pencapresan Jokowi di Media Massa